



SOROTI KINERJA PANSUS DPRD KOTA YOGYA

## Penyandang Disabilitas

## Tagih Kelanjutan Raperda

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disabilitas DPRD Kota Yogyakarta dinilai gagal. Pasalnya hingga kini raperda perlindungan hak-hak penyandang disabilitas belum disahkan sejak masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemerda) tahun 2016.

"Draf naskah akademik kami serahkan sejak tahun 2015. Sedangkan draf raperda sudah kami serahkan ke dewan untuk masukan sejak awal 2016. Tapi kenapa sampai sekarang belum selesai," kata Koordinator Forum Penguatan Penyandang Hak-hak Penyandang Disabilitas Ami Surwanti usai menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (6/9).

Menurutnya dengan tidak segera disahkannya raperda penyandang disabilitas, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas menjadi terhambat dan tidak terjamin sesuai kondisi di daerah. Dicontohkan akses jalan seperti trotoar yang masih banyak tidak digunakan untuk pejalan kaki dan tidak lengkap *guiding block*.

"Kami mendesak pansus DPRD Kota Yogyakarta untuk melaksanakan komitmen dan janjinya segera mempercepat pembahasan raperda secara terukur dan transparan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Semestinya DPRD lebih bertanggung jawab memastikan penyelesaiannya," paparnya yang mengalami

disabilitas pada kaki.

Perwakilan dari penyandang disabilitas tuli, Fikri Muhafiz menambahkan tidak hanya akses pelayanan umum di jalan, tapi juga pendidikan kepada disabilitas dinilai belum setara. Menurutnya, kurikulum pembelajaran bagi penyandang tuli di sekolah luar biasa masih jauh dibandingkan sekolah biasa.

"Kami harap pemerintah mendukung kesetaraan dan akses pelayanan umum, pendidikan dan pekerjaan," tambah Fikri dengan bahasa isyarat.

Sementara itu Perwakilan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah yang ikut dalam forum itu, Ahmad Ma'ruf menilai pansus raperda penyandang disabilitas gagal memahami penyandang disabilitas dan tugasnya. Forum sudah memberikan masukan draf raperda setelah raperda disabilitas ditolak di Biro Hukum DIY karena dinilai menyalin dengan Undang-Undang Disabilitas.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menyatakan aspirasi dari forum penyandang disabilitas



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005